

ANALISIS DAYASAING KOMODITI TEMBAKAU RAKYAT DI KLATEN JAWA TENGAH

SAPTANA, SUPENA FRIYATNO DAN TRI BASTUTI P.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor

ABSTRACT

Historically tobacco commodities had been interesting as high value commodity since Hindia Belanda Colonialist. Indonesian government to be continued tobacco development implemented by government estate enterprise (*Perusahaan Negara Perkebunan*). Tobacco farm by smallholder estate in Klaten objective to export commodities. Based on the problem in the tobacco commodities system, this paper have objective to : (1) Performance of tobacco economics; (2) Private and social analysis profitability; (3) Comparative and competitive analysis; (4) Incentives policy analysis in the tobacco commodities system; (5) To formulate development perspective on tobacco commodities. Methodological on this paper use Policy Analysis Matrix (PAM), especially to analysis competitiveness and impact of divergences. The result to describe that tobacco small holder farming in Klaten have comparative and competitive advantage, each to indicate coefficient value of DRC : 0.42-0.65 and PCR : 0.55-0.67. Even though tobacco market especially for export very high distorted, i.e. cukai cost have achieve 30-40 %. So that rural area in Klaten, Central Java more profitable to increasing for tobacco domestic production compared with import. Policy implication, tobacco production in Klaten can to be continued improvement by specific location of technology development. The several argument are efficiency of domestic resource use, extensive of labor absorption, and so to gate some foreign exchange that is scarcity.

Key Word: *Tobacco Cmmodities, Private and Social Analysis, Profitability, Comparative and Competitive Analysis, Policy Analysis Matrix (PAM),*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara historis komoditi tembakau sudah memperoleh perhatian yang besar sebagai komoditi komersial (*high value commodity*) sejak pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan penanaman tembakau tersebut terus dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia melalui perusahaan negara perkebunan (PNP). Dalam perkembangannya tanaman tembakau diusahakan secara cukup meluas oleh petani rakyat baik di Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur) dan di Luar Jawa (Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan).

Pengusahaan tembakau oleh petani rakyat terutama ditujukan untuk ekspor, biasanya merupakan tembakau asepan yang digunakan sebagai bahan baku cerutu dan tembakau rajangan yang digunakan sebagai bahan baku rokok umumnya terkena pajak biaya cukai yang sangat tinggi kurang lebih 40 persen. Kondisi ini sangat memberatkan dan tidak kondusif bagi pengembangan tembakau nasional, padahal komoditi ini sangat prospektif baik sebagai industri yang mampu menyerap tenaga kerja secara ekstensif khususnya dipedesaan, menciptakan nilai tambah melalui kegiatan industri pengopenan, pengasapan, perajangan dan pabrik rokok, serta sebagai penghasil devisa melalui kegiatan ekspor.

Liberalisasi perdagangan yang makin menguat dewasa ini memberikan peluang-peluang baru sekaligus tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi. Dari segi permintaan pasar, liberalisasi perdagangan memberikan peluang-peluang baru seperti pasar yang semakin terbuka sejalan dihapuskannya berbagai hambatan perdagangan antar negara. Namun liberalisasi perdagangan juga menimbulkan masalah-masalah serius jika komoditi yang diproduksi secara lokal tidak mampu bersaing di pasar dunia.

Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tulisan ini ditujukan untuk: (1) Keragaan ekonomi tembakau; (2) Melakukan analisis profitabilitas usahatani tembakau; (3) Melakukan analisis tentang keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif usahatani tembakau; (4) Mengkaji kebijakan insentif dalam sistem komoditi tembakau; dan (5) Merumuskan perspektif dalam pengembangan komoditi Tembakau.

METODOLOGI

Lokasi Penelitian, Informasi dan Data

Basis informasi primer dalam studi ini difokuskan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang diusahakan pada Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk sebagai desa contoh sawah irigasi teknis dan Desa Daleman, Kecamatan Tulung sebagai desa contoh sawah irigasi setengah teknis untuk tembakau asepan ; serta Desa Solodiran, Kecamatan Manisrenggo sebagai desa contoh irigasi sederhana untuk tembakau rajangan. Periode penelitian untuk komoditi selama satu musim MK I atau MK II, karena tanaman tembakau di pedesaan Klaten hanya diusahakan pada musim kemarau saja.

Data primer dan sekunder dianalisis secara proporsional. Pengumpulan data usahatani di tingkat petani tembakau dilakukan pada MK I atau MK II 2001. Di samping itu juga dilakukan penggalan data dan informasi kualitatif mengenai pasar input-output pertanian serta informasi lainnya di pedesaan secara berlapis dari tingkat desa, kabupaten dan propinsi, diantaranya adalah tokoh formal dan informal, pedagang pengumpul tingkat desa, Pedagang Besar, dan industri pengolahan tembakau yang lebih dikenal dengan industri pengopenan tembakau dan industri perajangan tembakau, serta perwakilan pabrik rokok yang beroperasi khususnya untuk tembakau rajangan.

Pendekatan Analisis

Analisis dititik-beratkan pada : trend areal, produksi dan produktivitas serta ekspor dan impor, keragaan sistem usahatani; analisis keuntungan baik secara finansial dan ekonomi; daya saing di tingkat petani serta menganalisis dampak kebijaksanaan insentif pemerintah terhadap sistem usahatani tembakau. Analisis Matriks Kebijaksanaan (*Policy Analysis Matrix, PAM*) digunakan untuk menganalisis: analisis kelayakan usaha baik secara *private* maupun secara *social*, keunggulan kompetitif (*efisiensi financial*) dan keunggulan komparatif (efisiensi ekonomi), serta dampak intervensi atau kebijakan pemerintah terhadap sistem komoditi. Pada penelitian ini akan di lihat pada tingkat usahatani (*level farm gate*), namun informasi pada industri pengolahan maupun pemasaran diperlukan dalam melakukan penyesuaian dalam penentuan harga sosial. Untuk jelasnya Matriks PAM dapat dilihat pada Tabel 1.

Baris pertama dari Matriks PAM adalah perhitungan dengan harga privat atau harga pasar, yaitu harga yang betul-betul diterima atau dibayarkan oleh pelaku ekonomi. Baris kedua merupakan perhitungan yang didasarkan pada harga sosial (*shadow price*), yaitu harga yang menggambarkan nilai sosial atau nilai ekonomi yang sesungguhnya bagi unsur-unsur biaya maupun hasil. Baris ketiga merupakan perbedaan perhitungan dari harga privat dengan harga sosial sebagai akibat dari dampak kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar yang ada.

Tabel 1. Format Policy Analysis Matrix (PAM)

	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Input Tradable	Input Non-Tradable	
Harga Privat	A	B	C	$D = A - B - C$
Harga Sosial	E	F	G	$H = E - F - G$
Divergensi	$I = A - E$	$J = B - F$	$K = C - G$	$L = I - J - K = D - H$

Sumber : Eric A. Monke dan Sott R. Pearson, 1989

Keterangan : D = Keuntungan Privat
H = Keuntungan Sosial
I = Transfer Output
J = Transfer Input
K = Transfer Factor
L = Transfer Bersih

Untuk input dan output yang dapat diperdagangkan secara internasional, harga sosial dapat dihitung berdasarkan harga bayangan (*shadow price*) yang dalam hal ini didekati dengan harga batas (*border price*). Untuk komoditi yang diimpor dipakai harga CIF (*Cost Insurance and Freight*), sedangkan komoditi yang diekspor digunakan harga FOB (*Free on Board*). Tentunya dilakukakan berbagai penyesuaian pada titik mana analisis akan dilakukan.

Sedangkan untuk input *non tradable* digunakan biaya imbangannya (*opportiny cost*), yang digali dari penelitian empirik di lapang.

Beberapa Indikator Hasil Analisis dari Matriks PAM Diantaranya adalah :

1. Analisis Keuntungan

a. *Private Provitability (PP) : $D = A - (B+C)$*

Keuntungan private merupakan indikator daya saing (*competitiveness*) dari sistem komoditi berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input dan transfer kebijaksanaan yang ada. Apabila $D > 0$, berarti sistem komoditi memperoleh profit atas biaya normal yang mempunyai implikasi bahwa komoditi itu mampu ekspansi, kecuali apabila sumberdaya terbatas atau adanya komoditi alternatif yang lebih menguntungkan.

b. *Social Provitability (PP) : $H = E - (F+G)$*

Keuntungan sosial merupakan indikator keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari sistem komoditi pada kondisi tidak ada divergensi baik akibat kebijakan pemerintah maupun distorsi pasar. Apabila $H > 0$, berarti sistem komoditi memperoleh profit atas biaya normal dalam harga sosial dan dapat diprioritaskan dalam pengembangan.

2. Efisiensi Finansial dan Efisiensi Ekonomi

a. *Private Cost Ratio (PCR) = $C/(A-B)$* : yaitu indikator profitabilitas privat yang menunjukkan kemampuan sistem komoditi untuk membayar biaya sumberdaya domestic dan tetap kompetitif. Jika $PCR < 1$, berarti sistem komoditi yang diteliti memiliki keunggulan kompetitif dan sebaliknya jika $PCR > 1$, berarti sistem komoditi tidak memiliki keunggulan kompetitif.

b. *Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) = $G/(E-F)$* : yaitu indikator keunggulan komparatif, yang menunjukkan jumlah sumberdaya domestik yang dapat dihemat untuk menghasilkan satu unit devisa. Sistem mempunyai keunggulan komparatif jika $DRC < 1$, dan sebaliknya jika $DRC > 1$ tidak mempunyai keunggulan komparatif.

3. Dampak Kebijakan Pemerintah

a. *Kebijakan Output*

(1) ***Output Transfer : $OT = A-E$*** : Transfer output merupakan selisih antara penerimaan yang dihitung atas harga finansial (*private*) dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan

harga bayangan atau sosial (*social*). Jika nilai $OT > 0$ menunjukkan adanya transfer dari masyarakat (konsumen) terhadap produsen, demikian juga sebaliknya.

(2). **Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO) = A/E** : yaitu indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap output tembakau domestik. Kebijakan bersifat protektif terhadap output jika nilai NPCO > 1 , dan sebaliknya kebijakan bersifat disinsentif jika NPCO < 1 .

b. Kebijakan Input

(1). **Transfer Input : $IT = B - F$** : Transfer input adalah selisih antara biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga private dengan biaya yang dapat diperdagangkan pada harga sosial. Jika nilai $IT > 0$, menunjukkan adanya transfer dari petani produsen kepada produsen input tradable, demikian juga sebaliknya.

(2). **Nominal protection Coefficient on Input (NPCI) = B/F** : yaitu indikator yang menunjukkan tingkat proteksi pemerintah terhadap harga input pertanian domestik. Kebijakan bersifat protektif terhadap input jika nilai NPCI < 1 , berarti ada kebijakan subsidi terhadap *input tradable*, demikian juga sebaliknya.

(3) **Transfer Faktor : $FT = C - G$** : Transfer faktor merupakan nilai yang menunjukkan perbedaan harga private dengan harga sosialnya yang diterima produsen untuk pembayaran faktor-faktor produksi yang tidak diperdagangkan. Nilai $FT > 0$, mengandung arti bahwa ada transfer dari petani produsen kepada produsen input non tradable, demikian juga sebaliknya.

c. Kebijakan Input-Output

(1). **Effective Protection Coefficient (EPC) = $(A-B)/(E-F)$** : yaitu indikator yang menunjukkan tingkat proteksi simultan terhadap output dan input tradable. Kebijakan masih bersifat protektif jika nilai EPC > 1 . Semakin besar nilai EPC berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditi pertanian domestik.

(2). **Net Transfer : $NT = D - H$** : Transfer bersih merupakan selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosialnya. Nilai $NT > 0$, menunjukkan tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input dan output, demikian juga sebaliknya.

(3). **Profitability Coefficient : $PC = D/H$** : Koefisien keuntungan adalah perbandingan antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih sosialnya.

Jika $PC > 0$, berarti secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen, demikian juga sebaliknya.

(4). *Subsidy Ratio to Producer (SRP)* = $L/E = (D-H)/E$: yaitu indikator yang menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai pengganti kebijakan.

Penentuan Input-Output Fisik

Input bibit tebu dan tembakau, pupuk yang digunakan memakai satuan kg, sementara untuk pestisida adalah liter, dan untuk satuan luas tanah adalah hektar. Tenaga kerja keluarga dan tenaga kerja luar keluarga dikonversi ke jam kerja pria (HKP) yang dalam penelitian langsung dinilai kedalam upah tenaga kerja (Rp/JK). Selanjutnya, untuk satuan output dilakukan penyesuaian dari tembakau olahan (asepan kering dan rajangan kering) ke tembakau daun basah. Struktur input dan output diperoleh dari hasil survei di lapangan.

Pengalokasian komponen Biaya Domestik dan Asing

Dalam studi ini, pembagaian komponen biaya kedalam komponen biaya asing dan domestik memakai pendekatan langsung. Hal ini didasarkan atas kenyataan untuk input tradable, baik barang impor maupun produksi dalam negeri, jika terjadi kekurangan permintaan dapat dipenuhi dari penawaran di pasar internasional.

Pada penelitian ini barang-barang yang diasumsikan 100 persen *tradable goods* adalah untuk tembakau hasil olahan (asepan dan rajangan) atau tembakau daun basah. Sedangkan untuk input adalah benih padi, pupuk Urea, TSP, SP-36, KCL, ZA, NPK, Pupuk Alternatif, ZPT, PPC, pestisida, alat angkut, dan alat penanganan. Di lain pihak, input yang diasumsikan 100 persen sebagai *domestic factors* adalah nilai sewa lahan, tenaga kerja, bunga modal, pupuk kandang, pajak dan iuran air.

Komposisi alokasi biaya domestik dan asing untuk kegiatan transportasi didasarkan atas hasil wawancara dengan berbagai pelaku tataniaga, di mana untuk biaya tenaga kerja dalam proses pengangkutan sebagai komponen domestik (*domestic factor*) dan biaya angkut sebagai yang merepresentasikan sewa alat angkut sebagai komponen asing (*tradable*). Demikian juga untuk kegiatan penanganan.

Pembagian komponen *tradable* dan *domestic factors* pada biaya penanganan didasarkan dari data hasil wawancara langsung dengan para pelaku ekonomi komoditi tebu atau gula putih dan tembakau daun basah atau tembakau hasil olahan. Biaya penanganan untuk komoditi tebu atau gula putih dan tembakau hasil olahan atau tembakau daun basah yang

diteliti terdiri dari biaya bahan (*tradable*) dan *domestic factors* untuk tenaga kerja/buruh. Secara terperinci hasil alokasi biaya kedalam komponen *domestic* dan asing dapat disimak pada Tabel Lampiran 1.

Justifikasi Dalam Penentuan Harga Sosial Input dan Output

1. Harga tembakau hasil olahan melalui proses asepan didasarkan atas harga FOB MK 2001 sebesar U\$ 1.029/kg, kemudian dikonversi dengan nilai tukar dollar terhadap rupiah rata-rata MK sebesar Rp. 11 143/U\$, sehingga menjadi Rp 11 466.1/kg. Tahap selanjutnya untuk ditambah biaya transport dari Pelabuhan Tanjung Emas ke PB propinsi sebesar Rp.27/kg, karena keseimbangan pasar ada di PB propinsi maka selanjutnya dikurangi biaya transport dari PB propinsi ke PB kabupaten Rp. 30/kg dan dari PB kabupaten ke petani Rp. 20/kg, setelah itu masih dikurangi biaya penanganan Rp. 13/kg. Sehingga diperoleh harga sosial dari tembakau olahan asepan di Klaten sebesar Rp. 11 430.1/kg. Kemudian dikonversi dari tembakau olahan asepan ke tembakau daun basah dengan dengan rendemen MK 12.5 % sehingga menjadi Rp. 1 371/kg, kemudian dikurangi biaya pengolahan Rp. 360,- /kg, sehingga di peroleh harga sosial untuk tembakau daun basah sebesar Rp.1 011.6,-/kg,-.
2. Harga tembakau hasil olahan melalui proses perajangan didasarkan atas harga FOB rata bulanan MK 2001 sebesar U\$ 1.672/kg, kemudian dikonversi dengan nilai tukar dollar terhadap rupiah rata-rata MK sebesar Rp. 11 143/U\$, sehingga menjadi Rp. 18 631.1/kg. Tahap selanjutnya ditambah biaya transport dari Pelabuhan Tanjung Emas ke PB Semarang sebesar Rp.27/kg, karena keseimbangan pasar berada di PB propinsi maka selanjutnya dikurangi biaya transport dari PB Semarang ke Pedagang Klaten Rp. 30/kg, selanjutnya dari Pedagang Klaten ke petani Rp. 20/kg, setelah itu dikurangi biaya penanganan Rp. 13/kg. Sehingga diperoleh harga sosial dari tembakau olahan rajangan kering di Klaten sebesar Rp. 18 595.1/kg. Kemudian dikonversi dari tembakau olahan rajangan ke tembakau daun basah dengan konversi tembakau MK 10 %, sehingga diperoleh besaran Rp. 1859.5/kg, kemudian dikurangi biaya pengolahan Rp. 464.9/kg, sehingga di peroleh harga sosial untuk tembakau daun basah, yaitu sebesar Rp. 1 394.6 /kg,-.
3. Untuk bibit tembakau (*native* atau *domestic tobacco*) karena pengadaannya sudah dalam bentuk bibit jadi berasal dari dalam negeri serta tidak adanya distorsi baik kerena distorsi kebijakan pemerintah maupun distorsi pasar, maka penentuan harga sosialnya didekati dari harga aktualnya.

4. Pupuk Urea untuk usahatani tembakau didasarkan harga FOB rata-rata MK, selanjutnya dikonversi dengan nilai tukar dollar terhadap rupiah rata-rata MK untuk tembakau. Tahap selanjutnya ditambah dengan biaya transport dari Pelabuhan masing-masing propinsi ke PB propinsi sebesar Rp.27/kg, karena keseimbangan pasar berada di PB propinsi maka selanjutnya dikurangi biaya transport dari PB propinsi ke pedagang kabupaten Rp. 30/kg, dari pedagang kabupaten ke petani Rp. 20/kg, selanjutnya dikurangi biaya penanganan Rp. 13/kg. Sehingga diperoleh harga sosial dari pupuk Urea untuk usahatani tebu dan tembakau di masing-masing lokasi.
5. Pupuk ZA untuk usahatani tembakau didasarkan harga CIF rata-rata satu musim kemarau, selanjutnya dikonversi dengan nilai tukar dollar terhadap rupiah rata-rata satu MK. Langkah perhitungan selanjutnya seperti perhitungan di atas.
6. Pupuk TSP untuk usahatani tembakau di dasarkan harga CIF rata-rata satu musim kemarau, selanjutnya dikonversi dengan nilai tukar dollar terhadap rupiah rata-rata satu musim kemarau. Langkah perhitungan selanjutnya seperti perhitungan di atas.
7. Pupuk SP-36 untuk usahatani tembakau didasarkan harga CIF rata-rata satu musim kemarau, selanjutnya dikonversi dengan nilai tukar dollar terhadap rupiah rata-rata satu MK. Langkah perhitungan selanjutnya seperti perhitungan di atas.
8. Pupuk KCL untuk usahatani tembakau didasarkan harga CIF rata-rata satu MK, selanjutnya dikonversi dengan nilai tukar dollar terhadap rupiah rata-rata MK. Langkah perhitungan selanjutnya seperti perhitungan di atas.
9. Pupuk NPK untuk usahatani tembakau didasarkan harga CIF rata-rata satu MK, selanjutnya dikonversi dengan nilai tukar dollar terhadap rupiah rata-rata MK. Langkah perhitungan selanjutnya seperti perhitungan di atas.
10. Harga bayangan pupuk organik/kandang dengan menggunakan harga pupuk organik/kandang aktual di masing-masing lokasi penelitian.
11. Pupuk ZPT/PPC untuk usahatani tembakau didasarkan harga CIF rata-rata satu MK, selanjutnya dikonversi dengan nilai tukar dollar terhadap rupiah rata-rata satu MK. Langkah perhitungan selanjutnya seperti perhitungan di atas.
12. Harga bayangan insektisida cair didekati dengan harga rata-rata aktual di masing-masing lokasi penelitian, kemudian dikurangi tarif impor sebesar 10 % dan pajak pertambahan nilai 10 %, sehingga diperoleh harga sosial dari insektisida cair untuk masing-masing lokasi penelitian.
13. Harga bayangan insektisida padat didekati dengan harga rata-rata aktual di masing-masing lokasi penelitian, kemudian dikurangi tarif impor sebesar 10 % dan pajak pertambahan

- nilai 10 %, sehingga diperoleh harga sosial dari Insektisida padat untuk masing-masing lokasi penelitian.
14. Harga bayangan fungisida cair didekati dengan harga rata-rata aktual di masing-masing lokasi penelitian, kemudian dikurangi tarif impor sebesar 5 % pertambahan nilai 10 %, sehingga diperoleh harga sosial dari fungisida cair untuk masing-masing lokasi penelitian.
 15. Harga bayangan fungisida padat didekati dengan harga rata-rata aktual di masing-masing lokasi penelitian, kemudian dikurangi tarif impor sebesar 5 % dan pajak pertambahan nilai 10 %, sehingga diperoleh harga sosial dari fungisida padat untuk masing-masing lokasi penelitian.
 16. Harga bayangan herbisida cair didekati dengan harga rata-rata aktual di masing-masing lokasi penelitian, kemudian dikurangi tarif impor sebesar 10 % dan pajak pertambahan nilai 10 %, sehingga diperoleh harga sosial dari herbisida cair untuk masing-masing lokasi penelitian.
 17. Harga bayangan herbisida padat didekati dengan harga rata-rata aktual di masing-masing lokasi penelitian, kemudian dikurangi tarif impor sebesar 10 % dan pajak pertambahan nilai 10 %, sehingga diperoleh harga sosial dari herbisida padat untuk masing-masing lokasi penelitian.
 18. Harga bayangan lahan didekati dengan nilai sewa lahan, hal ini dilandasi oleh : (1) bahwa mekanisme pasar lahan berjalan dengan baik yang ditunjukkan bejalannya sistem bagi hasil, sewa-menyewa lahan, beberapa kasus ditemui sistem gadai dan transaksi jual beli lahan; (2) mencari opportunity cost of land pada MH sangat sulit. Besarnya nilai sewa lahan bervariasi antar lokasi dan antar tipe irigasi.
 19. Harga bayangan tenaga kerja dihitung dengan menggunakan nilai upah aktual yang berlaku dimasing-masing lokasi penelitian, hal ini dilandasi bahwa mekanisme pasar tenaga kerja di sentra-sentra produksi padi yang umumnya mempunyai aksesibilitas yang sangat baik mendorong berjalannya pasar tenaga kerja di pedesaan serta makin terintegrasinya pasar tenaga kerja baik antar wilayah maupun antar sektor.
 20. Harga bayangan suku bunga modal (*interest rate*) menggunakan suku bunga riil, yang dihitung dengan mengurangkan suku bunga aktual dengan suku tingkat inflasi yang terjadi. Karena sebagian besar petani padi akses terhadap BRI dan BRI Unit maka tingkat suku bunga aktual menggunakan tingkat suku bunga KUPEDES BRI sebesar 2.50 %/bulan, sehingga suku bunga aktualnya ditentukan 2.5 %/bulan atau 30 %/tahun, dengan tingkat inflasi 7 %. Harga bayangan bunga modal dapat dihitung dengan mengurangkan tingkat suku bunga aktual 27 % terhadap tingkat inflasi 7 %, sehingga diperoleh harga bayangan bunga modal 22 % atau 7.33 % permusim tanam (4 bulan).

21. Harga bayangan nilai tukar rupiah terhadap dollar menggunakan aktual exchange rate, hal ini dilandasi bahwa Indonesia mengikuti regim nilai tukar bebas (*floating exchange rate*). Besarnya harga bayangan nilai tukar dihitung berdasarkan rata-rata nilai tukar dalam MK 2001 besarnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Rp. 10 157.5/US\$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Komoditi Tembakau

Perkembangan Luas Areal dan Produksi Tembakau di Indonesia

Pengusahaan tembakau di Indonesia khususnya di Jawa dapat dibedakan atas perkebunan tembakau rakyat yang di tanam di lahan sawah dan lahan kering, serta tembakau perkebunan besar nasional terutama milik perkebunan negara. Perkembangan luas areal dan produksi tembakau menurut sistem pengusahaannya selama periode (1990-2000) dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Luas Areal Tembakau dan Produksi Tembakau Menurut Jenis Pengusahaan, Tahun 1990-2000

Tahun	Luas Areal (Ha)			Produksi (Ton)		
	P. Rakyat	PBN	Jumlah	P. Rakyat	PBN	Jumlah
1990	231 284	4 582	235 866	152 768	3 664	156 432
1991	210 844	3 994	214 838	137 039	3 224	140 283
1992	162 685	4 162	166 847	109 566	2 089	111 655
1993	174 798	3698	178 496	118 936	2 434	121 370
1994	189 227	3868	193 095	127 730	2 404	130 134
1995	217 469	3 475	220 944	137 078	3 091	140 169
1996	222 025	3 450	225 475	148 435	2 590	151 025
1997	245 327	3 550	248 877	206 322	3 304	209 626
1998	161 550	3 937	165 487	102 174	3 406	105 580
1999	163 278	3 993	167 271	132 174	3 210	135 384
2000	164 712	3 976	168 688	132 408	3170	135 578
Rataan	194 836	3 905	198 717	136 785	2 964	139 749
Trend (%/th)	-1.65	-1.04	-1.63	0.35	1.00	0.36

Sumber : Statistik Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Tahun 2000.

Berdasarkan tabel 2 di atas memberikan beberapa gambaran sebagai berikut : (1) Luas areal tanam tembakau perkebunan rakyat mengalami penurunan dari 231234/210844 Ha (1990/1991) menjadi 164712/194836 Ha (1999/2000) atau mengalami penurunan sebesar -1.65 %/tahun, sedangkan luas areal tanam tembakau perkebunan besar nasional mengalami penurunan dari 4582/3994 Ha (1990/1991) menjadi 3976/3905 Ha (1999/2000) atau mengalami penurunan sebesar -1.05 %/tahun; dengan demikian secara total luas areal mengalami penurunan dari 235866/214838 Ha (1990/1991) menjadi 168688/198714 Ha (1999/2000) atau mengalami penurunan sebesar -1.63 %/tahun; (2) Pada periode yang sama produksi tembakau

sedikit mengalami peningkatan, produksi tembakau perkebunan rakyat naik 0.35 %/tahun, perkebunan besar nasional meningkat sebesar 1.00 %/tahun, dan secara nasional mengalami peningkatan sebesar 0.36 %/tahun; (3) Adanya penurunan luas areal yang kecil di satu sisi dan peningkatan produksi yang kecil di sisi yang lain menunjukkan adanya sedikit peningkatan dalam produktivitas, yang menunjukkan makin dikuasahnya adopsi teknologi budidaya oleh petani. Penurunan luas areal panen tembakau nampaknya terkait dengan kebijakan penghapusan subsidi pupuk sejak Desember 1998 dan bersamaan dengan krisis moneter, sehingga harga pupuk meningkat dua kali lipat, serta adanya fluktuasi harga yang tinggi di pasar internasional.

Perkembangan Ekspor dan Impor Tembakau

Konsumsi rokok nasional meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, serta berkembangnya industri rokok. Peningkatan permintaan tembakau domestik sudah tidak dapat dipenuhi lagi dari dengan peningkatan produksi domestik, sehingga sebagian kebutuhan tembakau kita harus dilakukan impor dengan tendensi yang semakin meningkat, meskipun posisi Indonesia saat ini adalah net eksportir.

Tabel 3. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor dan Impor Komoditi Tembakau Indonesia, Tahun 1990-2000.

Tahun	Ekspor				Impor			
	Volume (ton)		Nilai (000 \$)		Volume (ton)		Nilai (000 \$)	
	Tembakau	Daun tembakau	Tembakau	Daun tembakau	Tembakau	Daun tembakau	Tembakau	Daun embakau
1990	39 028	17 401	124 798	58 613	27 704	26 545	47 222	41 964
1991	45 146	22 403	145 932	57 860	29 933	28 543	67 654	58 430
1992	60 903	28 365	206 418	80 950	26 679	25 108	78 646	64 546
1993	70 770	37 888	176 652	66 238	32 877	30 226	99 544	76 997
1994	53 787	30 927	126 423	53 262	42 985	40 322	125 299	100 216
1995	53 002	21 989	186 769	61 456	52 204	47 954	156 129	115 474
1996	62 148	33 205	219 500	84 372	49 810	45 060	181 418	134 153
1997	75 883	42 281	245 797	104 743	52 140	47 108	206 549	157 767
1998	72 243	46 960	254 332	147 552	19 761	17 152	84 474	75 971
1999	62 468	37 097	212 073	91 834	43 626	40 913	141 060	128 019
2000	60 361	35 658	220 977	71 287	42 768	34 248	163 694	114 834
Rata-rata	59 613	32 198	192 697	79 883	38 226	122 881	122 881	97 125
Tred (%/th)	1.49	6.05	2.27	5.78	3.68	8.61	8.61	4.67

Berdasarkan Tabel 3 memberikan gambaran sebagai berikut : (1) rata-rata volume ekspor pada periode (1990-2000) mencapai 59 613 ton, sedangkan rata-rata volume ekspor daun tembakau kering mencapai 32 198 ton; (2) perkembangan volume ekspor tembakau meningkat sebesar 1.49 %/tahun dan dalam bentuk daun kering tumbuh rata-rata 6.95 %/tahun ; (3) Sementara itu perkembangan dalam nilai ekspor dalam bentuk tembakau sebesar 2.27 % per tahun dan dalam bentuk tembakau daun kering sebesar 5.78%/tahun; (4) rata-rata volume impor tembakau periode (1990-2000) mencapai 38 226 ton per tahun dan dalam bentuk tembakau daun kering sebesar 34 834 ton per tahun; (5) perkembangan impor tembakau selama periode tersebut meningkat sebesar 3.68 %/tahun dan dalam bentuk daun kering sebesar 2.68 %/tahun;(6) Sementara itu perkembangan impor dalam bentuk nilai untuk tembakau 8.61 %/tahun dan tembakau daun kering 4.67 %/tahun; (7) Jika di bandingkan dengan perkembangan luas areal, produksi, dan produktivitas tembakau dalam negeri maka Indonesia akan mengalami masalah yang serius, karena disatu sisi menghadapi persaingan global dan disisi lain adanya tuntutan dari lembaga kesehatan dan LSM untuk membatasi produksi rokok; (8) Adanya perkembangan nilai ekspor yang lebih rendah dibandingkan nilai importnya menunjukkan bahwa tembakau Indonesia mengalami penurunan kualitas dan daya saingnya di pasar dunia.

Pola Tanam dan Siklus Tanam

Berdasarkan kajian di lapang ternyata bahwa keputusan petani untuk menanam jenis tanaman apa pada musim yang bersangkutan sangat ditentukan ada atau tidaknya tanaman komersial yang dipandang menguntungkan. Sebagai ilustrasi di Kabupaten Klaten keputusan petani tentang jenis tanaman dan pola tanam yang dipilih sangat ditentukan kapan tanaman tembakau harus ditanam dan dipanen, sehingga dalam siklus tanam yang dipilih memberikan keuntungan yang maksimal bagi petani. Pola tanam dan siklus tanam di pedesaan sentra produksi tembakau di Klaten dapat di simak pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Keragaan Pola Tanam dan Siklus Tanam di pedesaan contoh Klaten, Jawa Tengah.

Uraian	Good Irrigated	Moderate	Poor	Rainfed
a. Pola Tanam	1. Pd-pd-tbk	1. Pd-tbk-jg	1. Kctnh-pd-tbk	1. Pd gora-pd-kdl
	2. Pd-pd-kdl	2. Pd-pd-jg	2. Pd-tbk-jg	2. Kdl-pd-kdl
	3. Pd-pd-Kctnh	3. Pd-jg-jg	3. Pd-tbk-cabe	3. Jg-pd -kdl
	4. Pd-pd-Jg			4. Kctnh-pd-kdl
	5. Tebu			
b. Siklus Tanam	1 : 4 tahun	1-3 :2-3atu tahun	1-3 : satu tahun	1-4 : satu tahun
	5 : 2-3 tahun			

Secara umum pola tanam yang ada di pedesaan contoh yang tidak ada perusahaan tanaman perkebunan adalah satu tahun, sedangkan yang ada tanaman tembakau ada yang satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Sementara itu untuk yang mengusahakan tanaman tebu maka lamanya siklus tanam 2-4 tahun, tergantung sampai keprasan berapa tebu akan dibongkar.

Beberapa jenis tembakau yang diusahakan petani di Kabupaten Klaten adalah tembakau Jawa asepan, Virginia dan tembakau Jawa rajangan. Varietas Jawa asepan yang paling dominan adalah grompol, sedangkan varietas Jawa rajangan adalah Bligon, Malawi dan Japlakan. Secara umum tanaman tembakau membutuhkan air dalam jumlah dan waktu yang harus dikendalikan dengan baik, melalui pengaturan sistem drainase yang baik. Meskipun membutuhkan air tanaman tembakau sangat rentan terhadap curah hujan yang terlalu tinggi. Dengan demikian tanaman tembakau mempunyai saat panen pada waktu musim kering, karena rendemen dan kualitas hasil dapat dipertahankan.

Hasil Analisis PAM serta Profitabilitas Finansial dan Sosial

Hasil analisis PAM, baik untuk usahatani tembakau asepan di desa contoh irigasi teknis dan irigasi setengah teknis serta pada tembakau rajangan di desa contoh irigasi sederhana di Kabupaten Klaten sebagai basis perhitungan dalam tulisan ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Analisis PAM Usahatani Tembakau Jenis Tembakau dan tipe irigasi, di Pedesaan Contoh Kabupaten Klaten, MK 2001.

No.	Uraian	Revenue	Tradable input	Domestic Factors			Profits
				Labor	Capital	Land	
1.	Tembakau Asepan						
	Irigasi teknis						
	-Private						
	-Social	9,689,048	1,656,331	2,764,440	433,348	1,750,000	3,084,929
	-Divergencies	13,138,890	1,546,263	2,764,440	332,233	1,750,000	6,745,954
		-3,449,842	110,068	0	101,114	0	-3,661,024
2.	Tembakau Asepan						
	Setengah Teknis						
	-Private						
	-Social	8,400,000	1,994,546	2,366,604	436,115	1,500,000	2,102,735
	-Divergencies	11,330,118	1,904,924	2,366,604	334,355	1,500,000	5,224,234
		-2,930,118	89,622	0	101,760	0	-3,121,499
3.	Tembakau Asepan						
	Sederhana						
	-Private						
	-Social	8,820,156	1,711,051	2,135,402	384,445	1,400,000	3,189,258
	-Divergencies	7,514,278	1,611,840	2,135,402	294,741	1,400,000	2,072,295
		1,305,878	99,211	0	89,704	0	1,116,963

Berdasarkan analisis biaya dan keuntungan secara private menunjukkan bahwa usahatani komoditi tembakau baik untuk tembakau asepan (kasus desa contoh irigasi teknis dan setengah teknis) maupun tembakau rajangan (desa contoh irigasi sederhana) di Kabupaten Klaten secara private memberikan keuntungan yang relatif besar. Untuk usahatani tembakau asepan di desa contoh irigasi teknis sebesar Rp. 3.08 juta/ha/musim dan irigasi setengah teknis Rp. 2.10 juta/ha/musim, sedangkan untuk usahatani tembakau rajangan sebesar Rp. 3.20 juta/ha/musim. Jika dibandingkan usahatani alternatif seperti padi pada musim MK1 dan MK II hanya memberikan keuntungan antara Rp. 476 ribu-740 ribu/musim. Relatif memadainya tingkat keuntungan private usahatani tembakau sangat terkait dengan tingkat produktivitas dan rendemen yang normal, sehingga meskipun harga tembakau daun basah sedang jatuh petani masih mendapat keuntungan yang memadai. Berdasarkan informasi kualitatif dari petani apabila kondisi harga tembakau normal maka petani memperoleh keuntungan antara 6-8 juta/ha/musim.

Sementara itu, analisis biaya dan keuntungan secara sosial atau ekonomik menunjukkan bahwa pengusahaan usahatani tembakau baik untuk tembakau asepan (kasus desa contoh irigasi teknis dan setengah teknis) maupun tembakau rajangan (desa contoh irigasi sederhana) di Kabupaten Klaten secara sosial memberikan keuntungan yang relatif besar. Besarnya keuntungan sosial untuk usahatani tembakau asepan pada desa contoh irigasi teknis sebesar Rp.6.75 juta/ha/musim, tembakau asepan pada irigasi setengah teknis sebesar Rp. 5.22 juta/ha/musim, dan untuk usahatani tembakau rajangan pada irigasi sederhana sebesar Rp. 2.07 juta/ha/musim. Besarnya biaya dan keuntungan usahatani tembakau secara private dan sosial dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Keuntungan Finansial dan Keuntungan Ekonomik, PCR dan DRC Usahatani Komoditi Tembakau di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Uraian	Keuntungan Finansial (000 Rp)	Keuntungan Ekonomik (000 Rp)	PCR	DRC
1. Sawah teknis tembakau asepan MK-1	3 084,9	6 746,0	0,62	0,42
2. Sawah ½ teknis tembakau asepan MK-1	2 102,7	5 224,2	0,67	
3. Sawah sederhana tembakau rajangan MK-II	3.189,3	2 072,3	0,55	0,45
				0,65

Dari tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa dari sisi keuntungan, besarnya keuntungan private yang dinikmati oleh petani tembakau menunjukkan bahwa dari sisi keuntungan, besarnya keuntungan private yang dinikmati oleh petani tembakau jenis asepan baik pada

desa contoh irigasi teknis maupun irigasi setengah teknis, lebih rendah dari keuntungan ekonomiknya. Sementara itu untuk jenis tembakau rajangan di desa contoh irigasi sederhana besarnya keuntungan lebih kecil dibandingkan keuntungan ekonomiknya. Fenomena untuk tembakau asepan merupakan indikasi bahwa harga input yang dibayar petani lebih tinggi dan atau harga output yang diterima oleh petani lebih rendah dari harga sosial. Sementara itu fenomena kedua menunjukkan bahwa harga input dan atau harga output yang diterima petani lebih tinggi dari yang seharusnya. Kalau ditelusuri faktor penyebab yang membedakan antara tembakau asepan dan rajangan adalah harga jual output dan tujuan pasarnya. Untuk tembakau asepan yang ditujukan pasar ekspor harga sosial jauh lebih tinggi dibandingkan harga privatenya, sedangkan tembakau rajangan demand dan pasarnya terbatas pada pabrik rokok domestik, bahkan sebagian harus diimpor.

Keunggulan Komparatif dan Kompetitif

Keunggulan Komparatif

Konsep daya saing berpijak dari konsep keunggulan komparatif yang pertama kali dikenal dengan model Ricardian, yang lebih dikenal dengan hukum keunggulan komparatif (*The Law of Comparative Advantage*) dari Ricardo. Teori keunggulan komparatif Ricardo yang disempurnakan oleh G. Haberler yang menafsirkan bahwa *labor of value* hanya digunakan untuk barang antara, sehingga menurut G. Haberler teori biaya imbalan (*theory opportunity cost*) dipandang lebih relevan. Selanjutnya, teori Heckscher Ohlin tentang pola perdagangan menyatakan bahwa :

Komoditi-komoditi yang dalam produksinya memerlukan faktor produksi (yang melimpah) dan faktor produksi (yang langka) di ekspor untuk ditukar dengan barang-barang yang membutuhkan faktor produksi dalam proporsi yang sebaliknya. Jadi secara tidak langsung faktor produksi yang melimpah di ekspor dan faktor yang langka di impor (Ohlin, 1933, hal.92 dalam Lindert dan Kindleberger, 1993).

Menurut Simatupang (1991) serta Sudaryanto dan Simatupang (1993) mengemukakan bahwa konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing (keunggulan) potensial dalam artian daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Komoditi yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Keunggulan komparatif bersifat dinamis, menurut Scydrowsky (1984) dalam Zulaiha mengatakan bahwa faktor-faktor yang berubah adalah ekonomi dunia, lingkungan domestik dan teknologi.

Berdasarkan pengertian di atas keunggulan komparatif adalah suatu ukuran relatif yang menunjukkan potensi keunggulan komoditi tersebut dalam perdagangan di pasar bebas

(bersaing sempurna). Dalam konteks tersebut maka faktor-faktor utama yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah: (1) apakah komoditi tembakau mempunyai keunggulan komparatif; (2) apakah keunggulan komparatif (potensial) dari komoditi tembakau di pasar juga unggul (memiliki keunggulan kompetitif); (3) apakah memiliki prospek keberlanjutan yang memadai; (4) bagaimana struktur proteksi yang ada dalam sistem komoditi tersebut dalam kaitannya dengan sistem insentif atau disinsentif yang dihadapi petani; dan (4) Kebijakan apa yang harus ditempuh agar keunggulan komparatif tersebut mewujudkan dalam keunggulan kompetitif dan berkelanjutan.

Berdasarkan informasi dari Tabel 6. secara umum dapat disimpulkan bahwa usahatani komoditi tembakau baik tembakau asepan (di desa contoh lahan sawah irigasi teknis maupun setengah teknis) dan tembakau rajangan (di desa contoh irigasi sederhana) menunjukkan bahwa komoditi tembakau mempunyai keunggulan komparatif, yang ditunjukkan oleh besaran nilai koefisien DRCR yang <1 . Hasil analisis untuk komoditi tembakau di Kabupaten Klaten, untuk usahatani tembakau asepan pada desa contoh irigasi teknis diperoleh nilai koefisien DRCR sebesar 0.42; untuk tembakau yang sama pada desa contoh irigasi setengah teknis diperoleh koefisien DRCR 0.45; dan untuk usahatani tembakau rajangan pada desa contoh irigasi sederhana diperoleh nilai koefisien DRCR sebesar 0.65. Jika dibandingkan dengan komoditi kompetitor utama yaitu padi, hanya diperoleh nilai koefisien DRCR rata-rata MH 1.04 dan MK 0.92 (Rchman *et. al.*, 2003), sedangkan untuk komoditi jagung diperoleh nilai koefisien DRCR antara 0.32-0.54 (Rusastra *et. al.*, 2003). Artinya komoditi tembakau memiliki keunggulan komparatif yang lebih tinggi dari komoditi padi, namun lebih rendah dari komoditi jagung.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa bagi Klaten, Jawa Tengah untuk menghasilkan satu-satuan output tembakau pada harga sosial diperlukan korbanan biaya sumberdaya domestik pada harga sosial lebih kecil dari satu. Atau dengan kata lain untuk menghasilkan satu-satuan devisa harus mengorbankan biaya imbalan sumberdaya domestik yang lebih kecil. Dengan hasil tersebut bagi Jawa Tengah atau Indonesia akan secara ekonomik akan lebih menguntungkan meningkatkan produksi dalam negeri dibandingkan mengimpor dari luar negeri. Hasil ini merupakan salah satu faktor penjelus makin berkembangnya industri pengolahan tembakau dan pabrik rokok dalam negeri meskipun terdapat kebijakan pemerintah yang sifatnya distortif terhadap peningkatan efisiensi dan dayaasaing pada sistem komoditi tersebut.

Keunggulan Kompetitif

Sudaryanto dan Simatupang (1993) mengemukakan bahwa konsep yang lebih cocok untuk mengukur kelayakan finansial adalah keunggulan kompetitif atau sering disebut "*revealed competitive advantage*" yang merupakan pengukur daya saing suatu kegiatan pada kondisi perekonomian aktual.

Hasil analisis yang dapat dilihat pada Tabel 6, untuk komoditi tembakau asepan di desa contoh irigasi teknis dan semi teknis masing-masing diperoleh nilai koefisien PCR 0.62 dan 0.67, sedangkan untuk tembakau rajangan di desa contoh irigasi sederhana diperoleh nilai koefisien PCR sebesar 0.55. Sebagai pembandingan hasil analisis untuk usahatani padi di Klaten diperoleh nilai PCR antara 0.76-0.94 (Rachman, *et. al.*, 2003). Sementara itu untuk komoditi jagung di Klaten antara 0.52-0.84 (Rusastra, *et. al.*, 2003). Hal tersebut menunjukkan bahwa komoditi tembakau di Klaten mempunyai keunggulan kompetitif yang lebih tinggi dibandingkan usahatani padi, namun lebih rendah dibandingkan komoditi jagung.

Nilai koefisien PCR untuk komoditi tembakau <1 , menunjukkan perusahaan usahatani komoditi tembakau di Kabupaten Klaten baik untuk tembakau asepan di desa contoh irigasi teknis dan setengah teknis maupun untuk komoditi tembakau rajangan di desa contoh irigasi sederhana menunjukkan usahatani tembakau mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi. Artinya untuk menghasilkan satu-satuan nilai tambah output pada harga privat hanya diperlukan kurang dari satu-satuan biaya sumberdaya domestik. Dapat juga mengandung makna untuk menghemat satu-satuan devisa pada harga privat hanya diperlukan korbanan kurang dari satu-satuan biaya sumberdaya domestik. Berdasarkan kajian di lapang dan studi pustaka menunjukkan keunggulan kompetitif komoditi tembakau disebabkan adanya kesesuaian agroklimat, teknologi budidaya dan pengolahan sudah dikuasai dengan baik. Hanya saja permasalahan pokok yang sering dihadapi petani tembakau adalah faktor eksternal diluar kontrol mereka, seperti fluktuasi harga di pasar dunia, fluktuasi nilai tukar, dan ada tidaknya distorsi baik yang disebabkan oleh pasar maupun oleh kebijakan pemerintah.

Sensitifitas Terhadap Produktivitas dan Harga

Analisis sensitivitas dilakukan pada perubahan produktivitas dan harga yang di perlukan untuk mencapai kondisi nilai koefisien DRCCR =1. Artinya untuk mencapai kondisi *break eve point* dan keunggulan komperatif (DRCCR=1) berapa produktivitas dan harga harus berubah. Jika nilai produktivitas dan harga aktual lebih tinggi dari nilai produktivitas dan harga pada kondisi keunggulan komparatif *brek even point* (DRCCR=1) mengandung arti

bahwa usahatani tembakau mempunyai keunggulan komparatif dan perlu mendapatkan prioritas dalam pengembangannya. Begitu juga dalam kondisi yang sebaliknya. Hasil analisis sensitivitas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 . Analisis Sensitivitas Terhadap Produktivitas dan Harga Tembakau yang Menyebabkan Nilai Koefisien DRCR = 1, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (MK 2001)

Uraian	Aktual		DRC=1	
	Yield (kg)	Social Price (Rp./kg)	Yield (kg)	Social Price (Rp./kg)
1.Sawah teknis tembakau asepan MK-1	12 988	1 011.6	6 320	492
2.Sawah ½ teknis tembakau asepan MK-1	11 200	1 011.6	6 036	545
3.Sawah sederhana tembakau Rajangan MK-II	5 388	1 394.0	3 904	1 010

Hasil analisis sensitivitas terhadap produktivitas dan harga pada usahatani komoditi tembakau pada musim kemarau memberikan gambaran yang sangat baik. Produktivitas aktual usahatani tembakau asepan maupun rajangan jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi produktivitas DRCR=1. Sebagai ilustrasi produktivitas aktual tembakau asepan di desa contoh irigasi teknis sebesar 12 988 kg/ha, untuk tembakau asepan di desa contoh irigasi setengah teknis sebesar 11 200 kg/ha, sedangkan untuk tembakau rajangan di desa contoh irigasi sederhana sebesar 5 388 kg/ha. Produktivitas *break event point* (DRCR=1) untuk tembakau asepan di desa contoh irigasi teknis sebesar 6 320 kg/ha, tembakau asepan di desa contoh irigasi setengah teknis sebesar 6 036 kg/ha, dan tembakau rajangan sebesar 3 904 kg/ha.

Hasil analisis untuk sensitivitas harga untuk usahatani tembakau pada musim kemarau memberikan gambaran yang relatif sama, di mana harga aktual jauh lebih tinggi dibandingkan harga pada kondisi DRCR=1, yaitu harga sosial untuk tembakau asepan di desa contoh irigasi teknis dan setengah teknis masing-masing Rp.1 011.6/kg dan untuk tembakau rajangan di desa contoh irigasi sederhana sebesar Rp.1 394/kg. Sementara itu, harga pada pada kondisi DRCR=1, untuk tembakau asepan di desa contoh irigasi teknis sebesar Rp. 492 /kg, untuk tembakau asepan di desa contoh irigasi setengah teknis sebesar Rp.545/kg, dan untuk tembakau rajangan di desa contoh irigasi sederhana sebesar Rp.1 010/kg.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa usahatani tembakau baik asepan di desa contoh irigasi teknis dan di desa contoh irigasi setengah teknis, dan untuk usahatani tembakau rajangan di desa contoh sederhana memiliki keunggulan komparatif yang cukup tinggi. Keunggulan komparatif yang dimiliki juga relatif stabil atau tidak rentan terhadap penurunan produktivitas dan penurunan harga. Kalau di lihat dari tingkat produktivitas yang dicapai secara nasional maka rata-rata tingkat produktivitas selama periode (1990-2000) mencapai 5 850 kg/ha, dari perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tingkat produktivitas usahatani di tingkat petani lebih tinggi, kecuali untuk tembakau rajangan. Sementara itu, dari hasil analisis sensitivitas terhadap harga, maka keunggulan komparatif akan terganggu kalau harga turun di bawah Rp. 495-549/kg untuk tembakau asepan dan Rp. 1013/kg untuk tembakau rajangan.

Kebijakan Insentif dan Struktur Proteksi

Ukuran dampak divergensi dan kebijaksanaan pemerintah dalam Matrik PAM adalah transfer output, transfer input, transfer faktor dan transfer bersih. Ukuran relatif ditunjukkan oleh analisis koefisien proteksi output nominal atau *nominal protection coefficient on output* (NPCO), koefisien proteksi input nominal atau *nominal protection coefficient on input* (NPCI), koefisien proteksi efektif atau *effectif protection coefficient* (EPC). Koefisien profitabilitas atau *profitability coefficient* (PC) dan rasio subsidi bagi produsen atau *subsidy ratio to producer* (SRP).

Proteksi Input

Kebijakan insentif yang terdapat pada *tradable input* ditunjukkan oleh nilai transfer input (IT) dan NPCI. Bentuk kebijaksanaan pada input tradable faktor dapat berupa kebijaksanaan perdagangan serta subsidi dan pajak, sedangkan bentuk divergensi lainnya dapat disebabkan adanya distorsi pasar. Transfer input menunjukkan selisih antara biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga private dengan biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga sosial. Koefisien proteksi input nominal (NPCI) sebagai indikasi transfer input yang merupakan rasio antara biaya *tradable input* yang dihitung berdasar harga private dengan biaya input tradable yang dihitung pada harga sosial. Secara lebih terperinci informasi mengenai nilai IT dan NPCI pada usahatani komoditi tembakau di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Nilai NPCI Usahatani Komoditi Tembakau per Ha/musim (MK 2001) di Klaten, Jawa Tengah.

Uraian	NPCI				
	Urea	TSP/SP-36	KCL	ZA	Input
1.Sawah teknis tembakau asepan MK-1	1.06	1.02	1.16	1.08	1,07
2.Sawah ½ teknis tembakau asepan MK-1	1.00	1.03	1.16	1.01	1,05
3.Sawah sederhana tembakau rajangan MK-II	0.99	1.02	1.16	1.10	1,06

Berdasarkan analisis Tabel 8 merefleksikan beberapa hal sebagai berikut : (1) untuk jenis pupuk urea, TSP/SP-36 dan KCL, serta ZA petani memberikan transfer positif dan nilai koefisien NPCI >1 masing-masing untuk ketiga jenis pupuk tersebut 1.00-1.06; 1,02 - 1.03; dan 1.16, serta 1.01-1.10 yang berarti petani memberikan transfer kepada produsen pupuk untuk keempat jenis pupuk tersebut; (2) struktur protrksi yang ada memberikan gambaran bahwa petani mengalami disinsentif dalam mengusahakan usahatani tembakau yang ditunjukkan adanya transfer positif, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien NPCI>1, yang berkisar antara 1.05-1.07; (4) Namun apabila dicermati kondisi pasar pupuk khususnya TSP/SP-36 dan ZA antara harga private dan harga sosial sudah relatif sama, yang menunjukkan pasar relatif terintegrasi dengan baik; (5) Sedangkan untuk jenis pupuk Urea dan KCL petani membayar dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang seharusnya, hal ini disebabkan dominannya peran PT PUSRI dalam mengendalikan harga pupuk urea dan masih terbatasnya jumlah importir untuk jenis pupuk KCL.

Proteksi Output

Campur tangan pemerintah atau adanya kebijakan insentif dalam output dapat dilihat dari besarnya nilai transfer output (OT) dan NPCO. Bentuk campur tangan pemerintah tersebut adalah kebijaksanaan perdagangan yang berupa pajak ekspor, tarif impor serta kebijaksanaan subsidi dan pajak. Transfer output merupakan selisih antara penerimaan yang dihitung atas harga private dengan penerimaan yang dihitung berdasar harga sosial. Koefisien proteksi output nominal (NPCO) merupakan indikasi dari transfer output yang ditunjukkan

oleh rasio antara penerimaan yang dihitung berdasar harga privat dengan penerimaan yang dihitung berdasar harga sosial. Informasi secara lebih terperinci dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Nilai OT dan NPCO Usahatani Komoditi Tembakau per Ha/musim pada MK 2001, di Klaten, Jawa Tengah.

Uraian	OT (000 Rp)	NPCO
1.Sawah teknis tembakau asepan MK-1	-3 449.8	0.74
2.Sawah ½ teknis tembakau asepan MK-1	-2 930.1	0.74
3.Sawah sederhana tembakau rajangan MK-II	1 305.9	1.17

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 9, diperoleh hasil transfer output (OT) dan NPCO untuk usahatani tembakau di Kabupaten Klaten. Hasil analisis menunjukkan untuk usahatani komoditi tembakau baik untuk tembakau asepan di desa contoh irigasi teknis dan semi teknis serta tembakau rajangan di desa contoh irigasi sederhana di Kabupaten Klaten diperoleh nilai OT yang negatif dan nilai koefisien NPCO <1. Besarnya nilai koefisien NPCO untuk tembakau asepan 0.74, yang berarti petani tembakau asepan yang merupakan tembakau ekspor menerima harga 26 persen lebih rendah dari yang seharusnya. Hasil analisis ini sangat terkait dengan kebijakan tembakau nasional khususnya tentang biaya cukai tembakau yang mencapai 30-40 persen dan tuntutan dari dunia kesehatan serta LSM akan bahaya merokok. Sementara itu untuk tembakau rajangan diperoleh nilai NPCO sebesar 1.17, yang mengandung arti bahwa produsen tembakau menerima harga 17 persen lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini disebabkan tembakau rajangan asal Manisrenggo, Klaten yang lebih dikenal tembakau Prambanan mempunyai kualitas yang baik sehingga diminati oleh industri rokok, hal ini ditunjukkan hampir sebagian besar pabrik rokok di Jawa mempunyai perwakilan disekitar lokasi penelitian.

Berdasarkan kajian di lapang menunjukkan bahwa pengembangan sistem komoditi tembakau mempunyai beberapa peranan penting : (1) tingkat produktivitas dan rendemen yang dihasilkan petani sudah cukup baik; (2) tingkat efisiensi industri pengolahan tembakau baik yang bersifat skala rumah tangga, kecil dan skala besar (pabrik besar nasional) khususnya di Jawa, telah dikuasai dengan baik; (3) ternyata industri pengolahan tembakau skala rakyat atau rumah tangga dan kecil menyerap kesempatan kerja secara ekstensif, yaitu sebesar 20-40 orang per industri, sedangkan industri skala besar menyerap ratusan tenaga

kerja dipedesaan, mereka lebih dikenal dengan buruh pabrik; (4) sementara itu industri rokok menyerap ribuan tenaga kerja; (5) secara makro nasional kegiatan ekspor tembakau hasil olahan mendatangkan devisa US \$ 92- 147 ribu atau secara keseluruhan termasuk perdagangan dalam bentuk rokok mendatangkan devisa tidak kurang dari US \$ 5.6 juta.

Proteksi Efektif

Kebjaksanaan input dan output secara keseluruhan dapat dilihat dari *nilai Net Trasfer* (NT), *Effektif Protection Coeficient* (EPC), *Profitability Coeficient* (PC) dan *Subsidy Ratio to Producer* (SRP). Hasil analisis dampak divergensi dan kebijaksanaan pemerintah terhadap input dan output pada usahatani tembakau dapat disimak pada Tabel 10.

Tabel 10. Nilai NT, PC, EPC dan SRP Usahatani Komoditi Tebu per Ha/musim pada MH 2000/2001 – MK II 2001, di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Uraian	NT	PC	EPC	SRP
1.Sawah teknis tembakau asepan MK-1	-3 661.0	0,46	0,69	-0,28
2.Sawah ½ teknis tembakau asepan MK-1	-3 121.5	0,40	0,68	-0,28
3.S*awah sederhana tembakau rajangan MK-II	1 119.6	1,54	1,20	0,15

Hasil analisis transfer bersih (NT) untuk komoditi tembakau asepan di desa contoh irigasi teknis dan setengah teknis serta tembakau rajangan di desa contoh irigasi sederhana di Kabupaten Klaten diperoleh nilai NT negatif. Artinya terdapat kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar pada input (*tradable input* dan *domestic faktor*) dan output secara keseluruhan yang merugikan petani tembakau.

Besarnya nilai koefisien EPC untuk komoditi tembakau baik tembakau asepan maupun tembakau rajangan diperoleh nilai koefisien $EPC < 1$, yang menunjukkan tidak adanya perlindungan atau proteksi pemerintah terhadap produsen atau petani tembakau bahkan petani harus mensubsidi pada produsen input dan konsumen tembakau, karena nilai tambah yang dinikmati petani tembakau lebih kecil dari nilai tambah secara sosial (Tabel 10).

Besarnya nilai koefisien PC di lokasi penelitian diperoleh koefisien PC positif lebih kecil dari 1. Artinya kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar yang ada pada usahatani komoditi tembakau, petani dirugikan karena petani memperoleh keuntungan jauh lebih rendah dari seharusnya.

Besarnya nilai koefisien SRP pada komoditi tembakau di lokasi penelitian dapat di simak pada Tabel 10. Untuk komoditi tembakau asepian diperoleh nilai koefisien SRP negatif, yaitu -0.28, sedangkan untuk tembakau rajangan bernilai positif 0.15. Artinya secara umum kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar yang ada memberikan dampak yang merugikan bagi petani tembakau asepian dan menguntungkan bagi tembakau rajangan. Karena petani tembakau asepian menerima subsidi negatif atau mereka harus membayar pajak, di bandingkan jika tidak ada kebijaksanaan pemerintah atau distorsi pasar, dan sebaliknya untuk tembakau rajangan.

Meskipun hasil analisis kebijakan insentif input dan output pada komoditi tembakau secara keseluruhan merugikan petani, namun petani nampaknya tetap mengusahakan tembakau dari waktu ke waktu. Beberapa argumen yang melandasi petani tetap mengusahakan komoditi tembakau adalah : (1) sudah relatif tingginya tingkat produktivitas dan rendemen tembakau di tingkat petani, yang menunjukkan sudah dikuasahnya dengan baik adopsi teknologi baik teknologi pembibitan, budidaya, panen, dan pasca panen, serta teknologi pengolahan, petani memperoleh bimbingan tidak hanya dari petugas penyuluh lapang tetapi juga dapat bimbingan dari produsen rokok; (2) kondisi di atas menyebabkan komoditi tembakau mampu bersaing dengan komoditi alternatif pada MK, bahkan kapan saat tanaman tembakau harus ditanam dan dipanen menjadi acuan dalam penentuan pola tanam dan siklus tanam; (3) Telah berkembangnya industri pengolahan tembakau baik tembakau asepian maupun rajangan pada berbagai skala pabrik (rumah tangga, kecil-sedang, dan skala perusahaan) menjadikan petani mempunyai beberapa pilihan dalam penjualan; (4) Masuknya 4 pedagang besar tembakau asepian (Kasus di Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten), serta masuknya pabrik rokok untuk berbagai merek (kasus di desa Solodiran, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten) ikut membantu mendorong perkembangan pengusahaan tanaman tembakau rakyat.

Implikasi kebijakan penting dari kondisi di atas adalah bagaimana meningkatkan daya saing industri tembakau rakyat yang pada dasarnya sudah memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, antara lain dengan : (1) terus meningkatkan produktivitas dan rendemen melalui penyediaan paket teknologi yang bersifat spesifik lokasi (lahan sawah dataran rendah VS lahan sawah dataran agak tinggi, serta lahan kering), dari teknologi pembibitan, budidaya, dan panen serta pasca panen; (2) meningkatkan pelayanan bimbingan dan penyuluhan melalui Ditjen Perkebunan dan tidak hanya menyerahkan masalah adopsi teknologi kepada pabrik rokok; (3) melakukan pembinaan industri pengolahan tembakau terutama untuk industri skala rumah tangga, kecil dan sedang pada aspek manajemen standarisasi mutu, hal ini dilandasi lebih rendahnya harga tembakau ekspor

dibandingkan tembakau ekspor; (4) menciptakan kebijakan pemerintah yang kondusif baik pada aspek budidaya, pengolahan, dan aspek distribusi yang ditujukan pada aspek perluasan kesempatan kerja serta perolehan dan sekaligus penghematan devisa; (5) pentingnya penelitian lanjutan yang difokuskan pada beberapa komoditi komersial (*high value commodity*) termasuk didalamnya tembakau sehingga dapat digali sumber-sumber keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Berdasarkan analisis biaya usahatani dan keuntungan menunjukkan bahwa usahatani tembakau memberikan keuntungan yang relatif tinggi atau di atas keuntungan normal dan jauh lebih tinggi dari keuntungan padi, meskipun saat ini harga tembakau di pasar internasional sedang tertekan dan pasar tembakau mengalami distorsi yang sangat besar terutama oleh tingginya bea cukai.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa usahatani komoditi tembakau asepun di desa contoh irigasi teknis dan semi teknis serta tembakau rajangan di desa contoh irigasi sederhana di Kabupaten Klaten memiliki keunggulan komparatif yang ditunjukkan nilai koefisien DRC <1 dan sekaligus memiliki keunggulan kompetitif yang ditunjukkan oleh nilai koefisien PCR <1, meskipun usahatani tembakau khususnya untuk ekspor terdistorsi dengan adanya bea cukai yang kurang lebih 30- 40 persen. Sehingga untuk Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dari segi ekonomi maupun private akan lebih menguntungkan meningkatkan produksi dalam negeri dibandingkan impor.
3. Implikasi penting dari hasil analisis ini adalah komoditi tembakau layak terus dikembangkan bukan saja dari segi ekonomi (sosial) menguntungkan, tetapi akan sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja secara ekstensif, serta dalam rangka perolehan devisa dan sekaligus penghematan devisa. Mengingat masalah pengangguran yang cukup tinggi dan peran industri tembakau dan rokok dalam penyerapan tenaga kerja, maka kebijakan pemerintah yang kurang bersahabat dengan petani dan pabrik rokok perlu ditinjau kembali.
4. Meskipun usahatani tembakau di lokasi penelitian Kabupaten Klaten memiliki keunggulan komparatif, tetapi apabila tidak dilakukan beberapa langkah pembenahan maka tidak akan dapat memiliki keunggulan kompetitif lagi, terutama jika orientasinya adalah pasar ekspor (kasus tembakau asepun). Untuk orientasi substitusi impor-pun (kasus tembakau rajangan) kondisinya rawan karena petani mengalami disinsentif dalam berusaha tembakau, baik pada pasar input maupun pada pasar output. Jika kondisi disinsentif tersebut berlangsung

permanen dalam jangka waktu 5 – 10 tahun mendatang, barangkali pengusaha komoditi tembakau di lokasi yang diteliti tidak akan berkelanjutan.

5. Beberapa titik-titik kelemahan yang perlu segera dibenahi dalam sistem komoditi tembakau adalah: (a) peningkatan tingkat produktivitas dan rendemen, yang sangat terkait dengan adopsi teknologi baik teknologi pembibitan, budidaya, panen dan pasca panen, (b) peningkatan efisiensi pada industri pengolahan melalui perbaikan manajemen standarisasi mutu dan kualitas hasil melalui reinvestasi sistem pengopenan dan perajangan yang lebih modern; (c) penurunan harga sarana produksi, terutama pupuk posphor dan Kalium serta pestisida /insektisida melalui penghapusan berbagai distorsi; (d) peningkatan harga jual output tembakau melalui penghapusan berbagai distorsi yang pada pasar output, seperti penurunan biaya cukai dan pajak pertambahan nilai, dan distorsi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. 1991. Cara Panen dan Pengolahan Daun Tembakau. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri. Bogor.
- Directorate General of Estate Council. 1998. Indonesia Sugar Council, Direktorat General Council. Departement of Forestry and Estate Republik Indonesia.
- Ditjenbun, 2000. Statistik Perkebunan Indonesia. Direktorat Jenderal Perkebunan. Jakarta.
- Gittinger, JP. 1986. Analisis Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian Edisi 1986 (Terjemahan). Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Haryono, Dwi, 1991. Keunggulan Komparatif dan Dampak Kebijakan Pada Produksi Kedelai, Jagung, dan Ubikayu di Propinsi Lampung. Tesis Magister sains. Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hutagaol, P., Erwidodo, I. W. R. Susila, dan R. Suprihatini. 1997/1998. Evaluasi Keunggulan Komparatif Produk Pangan Dalam rangka Pemantapan Kemandirian Pangan. Lembaga Peneltian Bogor. Dengan Proyek Peningkatan Ketahanan Pangan, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan. Jakarta.
- Kadariah, Lien Karlina dan Clive Gray. 1978. Pengantar Evaluasi Proyek. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Lindert, P. H. dan Ch. Dan Kindleberger. 1993. Ekonomi Internasional (Alih Bahasa Burhanuddin Abdullah). Edisi ke Delapan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Monke, E.A. dan Pearson, S.R. 1995. The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development. Cornel University Press, Ithaca and London.
- Rachmat, M. 1992. Profil Tebu Rakyat di Jawa Timur. Jurnal Agro Ekonomi. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Sudana, W., 2002. Efektivitas Kebijakan Perlindungan Terhadap Produsen Melalui Provenue Gula. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

- Rachman, B., P. Simatupang, dan T. Sudaryanto. 2003. Efisiensi dan Daya saing Sistem usahatani Padi. Bappenas bekerjasama dengan DAI dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Rusastra, I. W., B. Rachman, dan Supena Friyatno. Analisis Daya saing dan Struktur Proteksi Komoditi Palawija. Bappenas bekerjasama dengan DAI dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Zulaiha, Aida R. 1997. Efisiensi Finansial, Efisiensi Ekonomi dan Pengaruh Kebijakan Pemerintah pada Pengusahaan The Hijau di Jawa Barat dengan Pendekatan Policy Analysis Matrik. Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Lampiran 1. Alokasi biaya kedalam komponen domestik dan asing, pada sistem Komoditi Tebu dan Tembakau (daun basah), di Lima Kabupaten Contoh, 2000/2001-2001

No	Jenis Biaya	Domestik (%)	Asing (%)
A	Tingkat Usahatani		
1.	Benih tembakau	0	100,00
2.	Urea	0	100,00
3.	TSP	0	100,00
4.	SP-36	0	100,00
5.	KCL	0	100,00
6.	ZA	0	100,00
7.	Pupuk alternatif	100,00	0
8.	Pupuk organik	100,00	0
9.	ZPT	0	100,00
10.	PPC	0	100,00
11.	Insektisida	0	100,00
12.	Fungisida	0	100,00
13.	Herbisida	0	100,00
14.	Tenaga kerja buruh	100,00	0
15.	Penyusutan alat-alat	0	100,00
16.	Biaya modal	100,00	0
17.	Sewa lahan	100,00	0
18.	Sewa traktor	33,00	67,00
B	Industri Pengolahan dan Pelaku Tataniaga		
1.	Pengolahan Tembakau daun basah -tembakau asepan	33,00	67,00
2.	Pengolahan Tembakau daun basah-tembakau rajangan kering	33,00	67,00
3.	Pengangkutan tembakau asepan	55,00	45,00
4.	Pengangkutan tembakau kering rajangan	55,00	45,00
5.	Penanganan tembakau asepan	65,00	35,00
6.	Penanganan tembakau rajangan kering	65,00	35,00